

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DI
KELURAHAN KALIA LIA**

Diajukan Oleh :

YESI

4518013004



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan
Di Kelurahan Kalia Lia Kota Bau Bau

Nama : Yesi

Stambuk/NIM : 4518013004

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi


Tempat Penelitian : Kantor Lurah Kalia Lia Kecamatan Lea Lea Kota Bau Bau

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si
NIDN : 0924126801


Indah Syamsuddin, SE., M.Ak
NIDN : 0931128605

Mengetahui Dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi


Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si
NIDN : 0924126801


Thanwain, SE., M. Si
NIDN : 0930016801

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesi
Nim : 4518013004
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia Kota Bau-Bau.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 April 2022



Yesi

ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN KALIA LIA

Oleh :

Yesi

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Yesi.2022.Skripsi. Analisis *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia. Dibimbing oleh Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si dan Indah Syamsuddin, SE., M.AK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia.

Objek penelitian adalah pemerintah Kelurahan Kalia Lia dan masyarakat Kelurahan Kalia Lia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpul melalui Observasi, Wawancara Langsung dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kelurahan Kalia Lia sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi masyarakat, supermasi hukum, transparansi, efektif dan efisien dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di kelurahan kalia lia walaupun pelaksanaannya belum maksimal seperti pada prinsip partisipasi masyarakat karena tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran rendah namun menurut penulis pengawasan anggaran bukanlah tanggung jawab masyarakat atau bisa dibilang bukan tugas masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran melainkan tugas dari Pemerintah Kota.

Kata kunci : *good governance*, pengelolaan keuangan kelurahan

ABSTRACK**GOOD GOVERNANCE ANALYSIS IN FINANCIAL MANAGEMENT IN KALIA
LIA KELURAHAN****By :****Yesi****Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business****Bosowa University****ABSTRACT**

Yesi. 2022. Thesis. Analysis of good governance in financial management in Kalia Lia Village. Supervised by Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si and Indah Syamsuddin, SE., M.AK.

The purpose of this study was to find out about the implementation of good governance in financial management in Kalia Lia Village.

The object of research is the government of Kalia Lia Village and the people of Kalia Lia Village. This study uses a qualitative descriptive analysis method. The data in this study were collected through observation, direct interviews and documentation.

The results of this study indicate that the Kalia Lia sub-district government has implemented the principles of good governance consisting of community participation, rule of law, transparency, effectiveness and efficiency and accountability in financial management in the Kalia Lia sub-district although the implementation has not been maximized as in the principle of community participation because the level of community activity in conducting budget oversight is low, but according to the author, budget oversight is not the responsibility of the community or arguably not the task of the community in carrying out budget supervision but the task of the City Government.

Keywords: good governance, urban village financial management

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segera rahmat dan karunia-nya, serta salam dan sholawat hanya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Analisis *good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia Kota Bau Bau”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. pertama-tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa, Bapak prof. Dr. Ir. Batara Surya S.T., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

3. Bapak Thanwain, SE., M. Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, M.Si dan Ibu Indah Syamsuddin SE., M. AK selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberimotivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Seluruh Dosen Universitas Boswoa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta Seluruh Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, terimakasih atas bantuannya dalam mengurus administrasi.
6. Kepada Bapak Manati, S.Sos sebagai kepala Kelurahan Kalia Lia beserta seluruh pegawai/stafnya dan seluruh masyarakat Kelurahan Kalia Lia atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Kalia Lia.
7. Ayahanda (Basiri) dan ibunda (Zuhama) tercinta serta seluruh keluarga besarku yang telah banyak berkorban baik moral dan material untuk kemajuan pendidikan penulis serta sabar membimbing, mendoakan dan mendukung dalam kuliah terkhusus untuk tugas akhir yaitu skripsi.
8. Kepada teman-teman seperjuangan terimakasih atas kebersamaan selama ini mari bersama mencapai cita-cita.
9. Dan kepada diriku sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.

Makassar, 15 April 2022

Penulis



UNIVERSITAS
BOSOWA

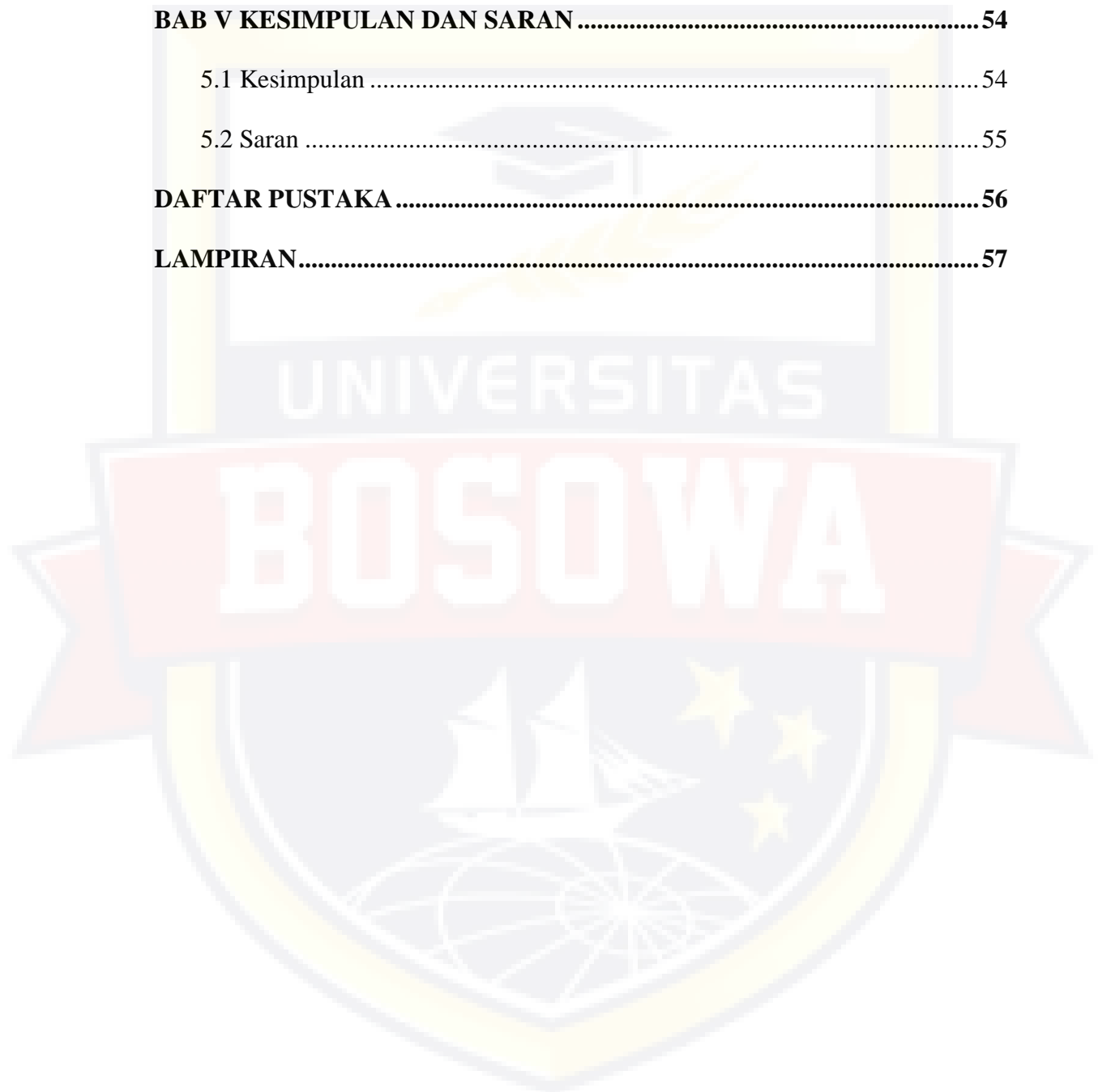
DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 <i>Good Governance</i>	6
2.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	9
2.1.3 Tujuan dan Manfaat <i>Good Governance</i>	13
2.1.4 Pengelolaan Keuangan	15
2.1.5 Fungsi Pengelolaan Keuangan	16

2.1.6 Tujuan Pengelolaan Keuangan.....	17
2.1.7 Proses Pengelolaan Keuangan.....	18
2.2 Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Tempat Penelitian	21
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	24
3.4 Metode Analisis	24
3.5 Defenisi Operasional.....	26
3.6 Jadwal Penelitian	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kalia Lia	30
4.1.1 Sejarah Kelurahan Kali Lia	30
4.1.2 Kondisi Geografis	31
4.1.3 Keadaan Sosia Budaya	32
4.1.4 Keadaan Ekonomi	33
4.1.5 Visi Dan Misi Kelurahan Kalia Lia.....	35
4.1.6 Kesehatan Dan Pendidikan.....	35
4.1.7 Struktur Pemerintah Kelurahan Kalia Lia.....	40
4.2 Deskripsi Data.....	45
4.3 Proses Wawancara	45
4.4 Hasil Interview	46

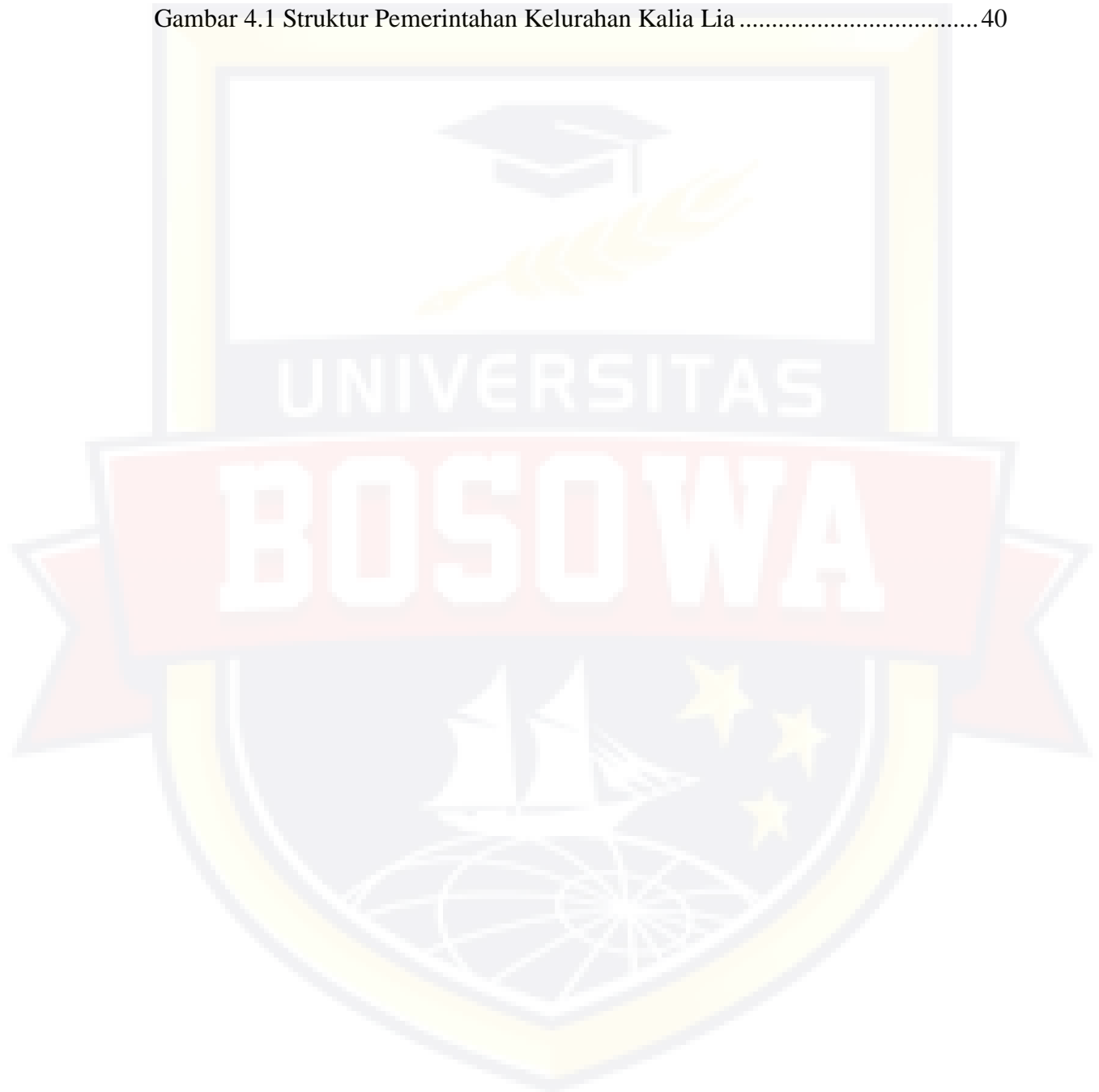
4.1.1 Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....22

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Kalia Lia40



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	32
Tabel 4.2 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kalia Lia	32
Tabel 4.3 Mata Pencarian Masyarakat	34
Tabel 4.4 Jenis Penyakit Yang Sering Diderita	36
Tabel 4.5 Kepemilikan WC.....	37
Tabel 4.6 Kepemilikan Air Bersih	37
Tabel 4.7 Responden Wawancara.....	45



UNIVERSITAS
BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan *good governance* atas dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu tanggung jawab, manajerial, dan pengawasan. Diterapkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang undang-undang Otonomi Daerah tahun 2010 akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara professional (Syamsuddin, I. 2019). Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu satunya masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada di tangan presiden konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang di serahkan ke daerah berjalan sesuai dari sisi struktur pemerintahan, kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah, dan merupakan

pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang *solid* dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggung jawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Good governance bukanlah isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik. Akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas topik *good governance* dalam pengelolaan keuangan kelurahan sebagai instansi pemerintah di Indonesia. Konsep *good governance* ini di gunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi kelurahan. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat kelurahan tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan selain itu dalam realitasnya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih

ditunjukkan kepada pemerintah pusat bukan masyarakat.

Di Indonesia masalah *good governance* disektor publik sudah mendapat perhatian yang cukup mendalam sejak pertengahan dekade 2000. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No KEP-49/M. EKON/II/TAHUN 2004 tanggal 30 november 2004, mempunyai tugas untuk memperluas cakupan tugas sosialisasi *good governance* bukan hanya disektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Pada tahun 2008 KNKG berhasil menerbitkan pedoman umum *good public governance* dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga negara dan juga lembaga pemerintah di Indonesia dalam melaksanakan *good public governance* antara lain dalam rangka untuk mendorong efektifitas penyelenggaraan negara serta mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selain KNKG pihak dari luar pemerintah pun telah melakukan upaya-upaya pengidentifikasian prinsip-prinsip *good public governance*, antara lain yang dilakukan oleh kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam mewujudkan *good governance*. Di Indonesia masih banyak kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Alam Syah, Abit, dan Sunariato tahun 2018 mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke 89 dari 180 negara. Pernyataan yang sama dari Abraham Samad sebagai mantan ketua komisi pemberantasan korupsi periode 2011 – 2015 mengatakan bahwa dalam laporan KPK per 31 desember 2017

terdapat 171 kasus korupsi disektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa (widiyaningrum & Rosmiati,2020).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan. Pertama, transparansi atau keterbukaan. Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan peleksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai (Abubakar dkk, 2021) Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Syamsuddin,2022). Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efesiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *Output* yang maksimal (berdaya guna) efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan publik.

Adapun faktor-faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian

pada Kelurahan Kalia Lia Kecamatan Lea Lea Kota Bau Bau yaitu untuk menganalisis *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Karena peneliti ingin menjelaskan terkait partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Peneliti memilih meneliti mengenai program ini karena jika tata kelola keuangan dilakukan dengan baik tentu akan berdampak terhadap sistem pemerintahan serta terhadap kemajuan dari sistem tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan dari pengelolaan keuangan kelurahan tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel dan transparansi. Alasan lain penulis ingin meneliti di Kelurahan Kalia Lia yaitu penulis menduga bahwa Kelurahan Kalia Lia tidak transparansi di tandai dengan tidak adanya papan pengguna informasi. Dari latar belakang yang telah diurai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kelurahan Kalia Lia Kecamatan Lea Lea Kota Bau-Bau dengan judul **“Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia Kota Bau-Bau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ”Bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia Kota Bau Bau”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di

Kelurahan Kalia Lia Kota Bau Bau.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, bagi akademis dan bagi pemerintahan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis khususnya mengenai *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat memenuhi standar kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi pihak akademik untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan lebih lanjut mengenai *good governance* dalam laporan keuangan.

3. Bagi Kantor Lurah Kalia Lia

Dapat membantu kantor Lurah Kalia lia dalam pengelolaan keuangan guna terwujudnya prinsip-prinsip *good govercance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kerangka Teori

1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Hendra Kariangan (2017:40), *Good governance* merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi. Menurut Sri Mulyani dkk (2017:194) *Good governance* merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

Sedangkan menurut Reydonnyzar Moenek (2019:58) yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *good governance* pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa *good governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintah dewasa ini. Meningkatkan semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bercirikan *good governance* terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama sejak kemunduran kinerja ekonomi yang kita alami.

Good governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya Era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*.

Berdasarkan teori di atas yang di kemukakan oleh para ahli disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya

alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi.

2.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Konsep *good governance* mengacu pada nilai atau prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggara pemerintah yang baik dan buruk. Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antar konsepsi pemerintahan (*good governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peran masyarakat termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Kunci utama untuk memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip yang terletak di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dilaksanakan dengan baik. Ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip *good governance* telah di terapkan dengan baik.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Nurul, Rigel (2017) , prinsip-prinsip *good governance* meliputi:

- a) Partisipasi Masyarakat
- b) Tegaknya Supremasi Hukum
- c) Transparansi

- d) Daya Tangkap
- e) Berorientasi Pada Konsensus
- f) Kesetaraan
- g) Efektivitas Dan Efisiensi
- h) Akuntabilitas
- i) Visi Strategis

Menyadari pentingnya prinsip-prinsip *good governance* maka akan diuraikan satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip ini mendorong agar semua masyarakat mau memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah maupun yang telah ditetapkan. Partisipasi penyaluran dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dengan dilibatkannya masyarakat dan turut serta dalam proses tersebut, maka itulah yang disebut adanya pemikiran yang demokratis.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Semua yang telah diatur dalam hukum tidak ada yang di istimewa, semua harus

sama dimata hukum. Dalam prinsip ini juga termasuk didalamnya hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi yang transparan akan menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses informasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-Lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*. Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang cepat, proses pemerintahan pun harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik.

5. Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal ini kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Dalam hal ini harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya.

7. Efektivitas Dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab.

Harus ada pengawasan agar tercapai sebuah efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait.

Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada lembaga maupun organisasi yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan masing-masing pihak berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan jenis organisasi yang bersangkutan. Agar apa yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dipantau juga oleh para pemangku kepentingan.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Setiap kegiatan yang di rencanakan harus memiliki tujuan yang jelas

bagi masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan di butuhkan di masa yang akan datang, sehingga prinsip ini harus berorientasi bagi cita cita masa depan.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat *Good Governance*

Kunci utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah memahami dan melaksanakan prinsip *good governance*. Bertolak dari prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Baik buruknya pengelolaan daerah biasa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua prinsip *good governance*.

Pada prinsipnya, penilaian di atas menggambarkan sejauh mana pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri biasa digambarkan sebagai kondisi di mana jalannya pemerintahan didukung oleh peran serta kekuatan sipil (*civil society*) dalam pengawasan dan mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas, terutama dalam pemenuhan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Prinsip di atas paling relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam mengumpulkan data dan menganalisis permasalahan. Hal ini ditunjukkan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi prinsip *good governance* pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah.

Dengan dijalankannya prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan tujuan dari *good governance* itu sendiri akan tercapai. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah :

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Reydonnyzar Moenek (2019:52) menyebutkan bahwa manfaat dari *good governance* adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya secara nyata praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) pada birokrasi pemerintahan.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perundang dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara kelompok atau golongan masyarakat
4. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah.

Good governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu *good governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan.

2.1.4 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut Reydonnyzar Moenek (2019:11), Pengelolaan Keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi)

pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen objektif pembicaraan kebijakan publik.

Menurut Purba *et al.*, (2021:114) Pengelolaan Keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo *et al.*:2020:1).

2.1.5 Fungsi Pengelolaan Keuangan

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) adalah :

1. Perencanaan Keuangan Dan Anggaran (*Budgeting*)

Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan.

Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.

2. Pengendalian (*Controlling*)

Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya.

3. Pemeriksaan (*Auditing*)

Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.

4. Pelaporan (*Reporting*)

Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.

2.1.6 Tujuan Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty (2019:1) tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip:

1. Konsistensi, merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas, merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

3. Transparansi, prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.
4. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan ini, pihak pengelola memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi resiko sekecil mungkin.

2.1.7 Proses Pengelolaan Keuangan

Menurut Kuswadi Analisa keuangan merupakan fondasi keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun dimasa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang mendatang. Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswadi kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran

keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Menurut Sulistyowati *et al.* (2020:3) Anggaran adalah perencanaan perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Jenis-jenis anggaran komprehensif adalah :

- a. Anggaran produksi
- b. Anggaran penjualan
- c. Anggaran modal
- d. Anggaran laba

Perencanaan keuangan dibutuhkan untuk dapat menyusun kebutuhan dana untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidak pastian masa yang akan datang. Perencanaan perlu dilakukan secara terus menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya (Sulistyowati *et al.*:2020:2).

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tersebut. Contoh pencatatan dapat berupa nota, kuitansi, faktur, dll. Langkah selanjutnya

menulis transaksi dalam jurnal, lalu di *posting* ke buku besar. Sebelum memulai pencatatan harus memahami prinsip dasar dari pencatatan transaksi

keuangan yang sama dengan dasar akuntansi yaitu :

$$\text{Harta} = \text{Hutang} + \text{Modal}$$

Atau

$$\text{Aktiva} = \text{Passiva}$$

3. Pelaporan

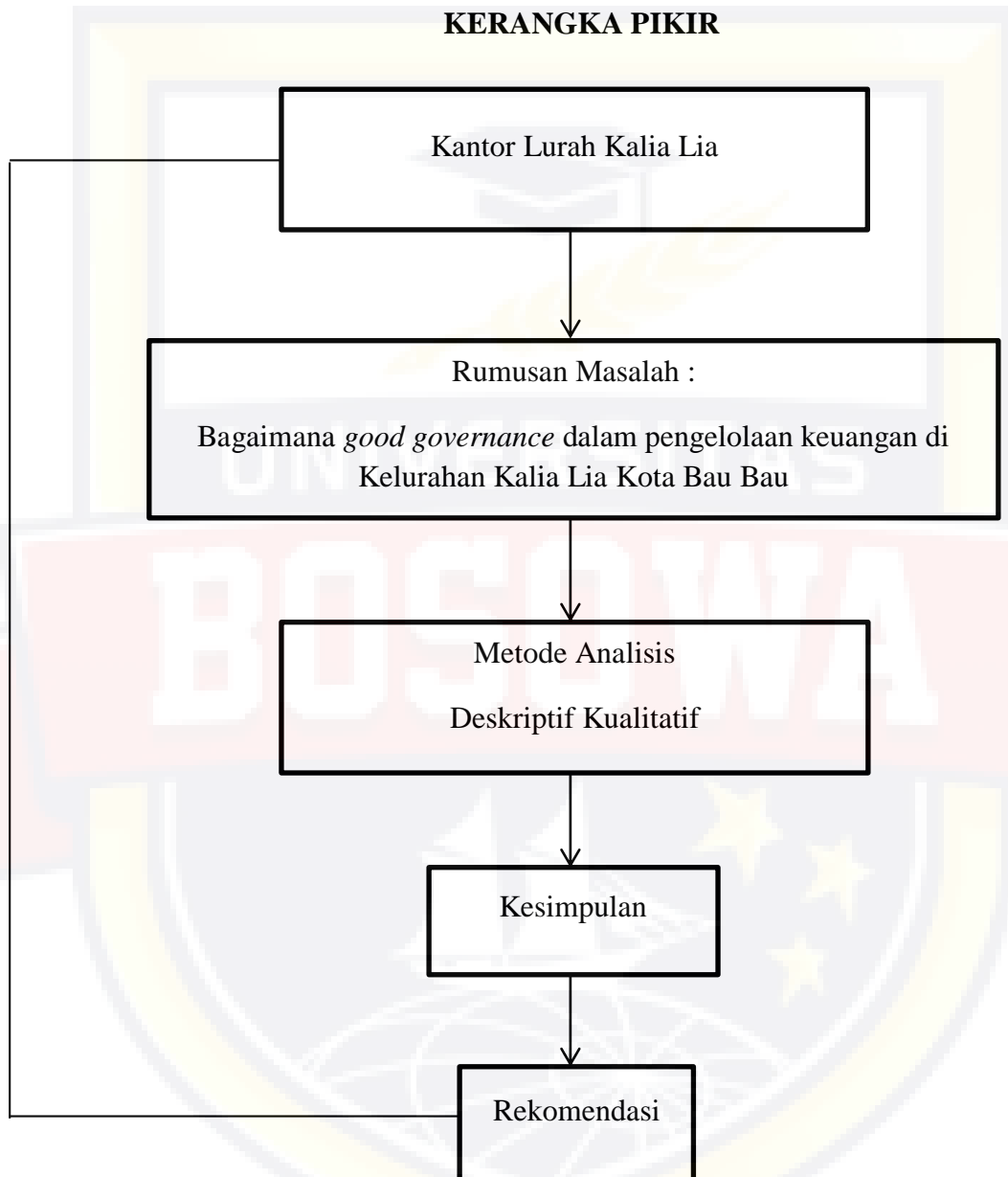
Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kuswadi kegiatan dari pengendalian, salah satunya adalah pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan dan pengendalian umpan balik.

2.2 Kerangka Pikir

GAMBAR 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Lurah Kalia Lia Kecamatan Lea Lea Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara adapun waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah \pm 2 (dua) bulan lamanya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data dan informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *observasi*, *interview*, dan metode kepustakaan

1. *Observasi* (Pengamatan Langsung)

Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. Dapat didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Untuk mendapatkan data yang konkret, peneliti melakukan kunjungan langsung di kantor Lurah Kalia Lia.

Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai *good governance* dalam laporan keuangan yang dilakukan pada Kelurahan Kalia Lia Kota Bau-Bau

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan usaha untuk menggali informasi secara lisan dengan cara berinteraksi langsung yang dilakukan dua orang atau lebih.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan dan penelusuran terhadap data-data yang dapat di jadikan sebagai bahan untuk memperkuat penjelasan terhadap bahan atau masalah yang diteliti

Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah:

- a. Sejarah Kantor Lurah Kalia Lia
- b. Struktur Organisasi Kantor Lurah Kalia Lia
- c. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan

4. Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca dan

mempelajari buku-buku akuntansi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna untuk memperoleh kerangka teori sekaligus sebagai alat dalam menganalisis data yang diperoleh untuk keperluan penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Dalam penulisan ini data kualitatif berupa wawancara atau informasi yang dianggap memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan mengenai *good governance* atas pengelolaan keuangan.

3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan yang harus diolah dan perlu dikembangkan lagi oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bidang keuangan serta pegawai lainnya yang dapat memberikan informasi yang perlu dalam penulisan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku (*referensi*), website, dokumen, jurnal dan bahan-bahan lainnya sebagai pegangan dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia, peneliti akan melakukan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para narasumber yakni kepala kelurahan, sekretaris lurah, bendahara lurah, pegawai kantor lurah dan masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia.

2. Menganalisis hasil wawancara yang telah di deksripsikan

Peneliti akan mendeksripsikan jawaban para narasumber yakni kepala kelurahan, sekretaris lurah, bendahara lurah, pegawai kantor lurah dan masyarakat mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia.

3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban wawancara.

Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia.

4. Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisa data tersebut. Adapun metode

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang di gali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam kerangka-kerangka saja. Analisis secara deksriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deksriptif ini dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif.

Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi dilapangan Kelurahan Kalia Lia Kecamatan Lea Lea Kota Bau Bau.

3.5 Defenisi operasional

Dari pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini dan petunjuk bagi yang memerlukan, yaitu:

1. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

2. Partisipasi Masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbang inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatifitasnya dapat disampaikan dengan rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberikan informasi antara pemerintah dan msasyarakat. Jadi dalam partisipasi masyarakat terdapat komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dan sesama anggota masyarakat.
3. Tegaknya Supremasi Hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara Negara.
4. Transparansi adalah sebuah kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi yang transparan akan menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses informasi.
5. Efektifitas Dan Efisiensi, efektifitas merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan

yang di jalankan, sedangkan efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya.

6. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari penerapan *good governance*. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Pengelolaan Keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, pengelolaan keuangan perusahaan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga, perusahaan maupun pemerintahan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kalia Lia

4.1.1 Sejarah Kelurahan Kalia Lia

Kelurahan Kalia Lia berasal dari kata lia yang artinya goa atau lubang. Dimana menurut cerita masyarakat setempat yang pertama menemukan pulau ini adalah seorang nelayan yang terdampar didalam goa. Dan saat ini goa tersebut masih ada tepat dibawah masjid Ar-Rahman di Kelurahan Kalia Lia.

Kelurahan Kalia Lia dulunya merupakan satu dusun, dan berubah menjadi satu desa dan akhirnya dengan terbentuknya Kota Bau Bau menjadi salah satu kelurahan. Jumlah penduduk saat ini sekitaran 1424 jiwa, dan berdasarkan hasil sensus yang dilakukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kelurahan Kalia Lia ada sekitar 366 kk.

Pada tahun 2000 Kelurahan Kalia Lia kedatangan warga dari ambon (eksodus) sekitar 1000 jiwa. Hal ini menyebabkan membengkaknya jumlah penduduk saat itu. Sebagian dari merek tidak memiliki pekerjaan maka warga setempat membuka lahan baru untuk dijadikan lahan perkebunan. Saat itulah sebagian warga berprofesi sebagai petani jambu mente, rumput laut, coklat, dan sawah.

Pada tahun 2004-2005 jalan poros kalia lia mulai diaspal sehingga warga dapat mengakses dan menjual hasil pertanian dan rumput lautnya dengan mudah.

Selain itu juga warga mulai banyak memiliki kendaraan roda dua walaupun hanya bisa dilakukan secara kredit.

Tahun 2006-2007 ada beberapa kemajuan dan perkembangan yang dilakukan yakni terbangunnya jembatan penyebrangan sebagai pelabuhan antara pulau, rehab pasar tradisional, dan terbangunnya posyandu. Yang semuanya memberikan dampak positif buat warga kalia lia.

Tahun 2008 Kelurahan Kalia Lia di mekarkan menjadi dua kelurahan yakni Kelurahan Kalia Lia dan Kantalai. Hal ini bersamaan dengan pemekaran kecamatan bungi, sehingga Kelurahan Kalia Lia masuk dikecamatan pemekaran yakni Kecamatan Lea Lea, dan sekaligus sebagai ibu kota Kecamatan Lea Lea. Hal ini berdampak pada pelayanan ditingkat kelurahan, khususnya dalam pembagian raskin dan dana bantuan yang tidak lagi harus memikirkan pembagian di wilayah pemekaran.

4.1.2 Kondisi Geografis

Kelurahan Kalia Lia merupakan ibukota Kecamatan Lea Lea, letak Kelurahan Kalia Lia dan Kecamatan Lea Lea dengan jarak $\pm 0,5$ km sedangkan Kota Bau Bau berjarak ± 20 km. Kelurahan Kalia lia memiliki luas wilayah 365,555 ha/m² dan memiliki 2 rukun warga (RW) yakni RW 01 lingkungan kalia lia dan 02 lingkungan kancese

Kelurahan Kalia Lia berbatasan dengan

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan palabusa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan lowu-lowu dan kolese
3. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan kantalai, dan

4. Sebelah barat berbatasan dengan selat buton.

4.1.3 Keadaan Sosial Budaya

Kelurahan Kalia Lia memiliki jumlah penduduk sekitar 1424 jiwa dimana terdapat 755 berjenis kelamin laki-laki dan 669 berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sekitaran 366 KK.

Table 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk		Total
	L	P	
RW 01 / (lingkungan kalia lia)	487	432	919
RW 02 (lingkungan kancese)	268	237	505
Total Penduduk	755	669	1424

Sumber : Profil Kelurahan Kalia Lia Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kalia Lia berjumlah 1.424 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2
tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan kalia lia

	Tingkat Kesejahteraan				Total
	Mampu	Sedang	Kurang Mampu	Tidak Mampu	
Jumlah KK	25	163	150	28	366
Persentase	6,84	44,53	40,98	7,65	100

Sumber Profil Kelurahan Kalia Lia Tahun 2022

Dari data diatas dapat dilihat dengan jelas Kelurahan Kalia lia termasuk warga yang miskin, karena sekitar 50% warga masih berada dalam keadaan kurang mampu dan tidak mampu, dan hanya 6,84% warga yang tergolong mampu, berdasarkan hasil peninjauan dan sensus secara langsung yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat terlihat dengan jelas warga yang tidak mampu dari 366 KK, yang tergolong tidak mampu sebanyak 28 KK (7,65%), KK yang tergolong kurang mampu sebanyak 150 KK (40,98%). Sedangkan Kepala keluarga yang tergolong sedang sebanyak 163 KK (44,53%).

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Berbagai sumber mata pencaharian yang dikembangkan oleh masyarakat utamanya petani dan nelayan, sangat dipengaruhi oleh iklim dan curah hujan.

Dalam melakukan aktifitas pertanian/perkebunan serta perikanan baik laki-laki maupun perempuan selalu bekerjasama. Aktifitas perempuan dibidang pertanian/perkebunan yaitu membantu suami pada pekerjaan berat seperti membuat pagar dan membersihkan lahan. Pada aktifitas budidaya rumput laut, perempuan melakukan penyiapan tali bentangan dan mengikat bibit pada tali yang akan dibantang untuk pembibitan rumput laut. Sedangkan nelayan laki-laki melakukan pencarian ikan dilaut dalam dan menggunakan pancingan.

Secara umum tingkat perekonomian masyarakat kelurahan kalia lia sangat dipengaruhi oleh beberapa bagian diantaranya tentang mata pencaharian, kepemilikan asset ekonomi, sarana prasarana, usia produktif dan sumber daya alam. Aktifitas warga dalam mengisi waktu untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mencari ikan dengan alat yang sederhana seperti alat pancing, bubu dan jaring. Hasil tangkapan juga hanya untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan dijual jika hasilnya banyak. Untuk yang bertani biasanya

hanya menanam ubi kayu, jagung serta sayur-sayuran, untuk pembudidaya rumput laut hanya digeluti oleh sebagian KK saja karena beberapa tahun terakhir kegiatan pembudidayaan rumput laut kurang baik/sering mengalami kegagalan.

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kalia Lia

No	Pekerjaan	KK	Persen (%)
1	PNS	7	1,91
2	Pengusaha	0	0
3	Pedagang	21	5,61
4	Petani	69	18,85
5	Swasta	24	6,55
6	Nelayan	69	18,85
7	Serabutan	42	11,47
8	Pertukangan	25	6,83
9	Pensiun	7	1,91
10	Sopir	15	4,09
11	Ojek	16	4,37
12	Buruh	41	11,20
13	Tidak ada pekerjaan	30	8,19
Total		366	100

(Sumber : Profil Kelurahan Kalia Lia Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 3, masyarakat Kelurahan Kalia Lia mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Lahan di Kelurahan Kalia Lia merupakan

tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian/perkebunan. pertanian dan nelayan merupakan mata pencarian yang menyumbangkan pendapatan paling besar bagi masyarakat kelurahan kalia lia. Tanaman yang paling sering ditanam oleh masyarakat kalia lia yaitu jambu mente, coklat, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sayur-sayur lainnya. Tanaman buah paling banyak di kelurahan kalia lia yaitu tanaman pisang, kelapa.

4.1.5 Visi Dan Misi Kelurahan Kalia Lia

A. Visi

“Mewujudkan Kelurahan Kalia Lia yang sejahter, aman adil dan makmur serta berpendidikan dan kesetaraan gender dengan memanfaatkan sumber daya yang ada “

B. Misi

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur, sarana umum, pendidikan dan sarana kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat warga baik perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan peranan.
3. Meningkatkan citra budaya lokal Kelurahan Kalia Lia.
4. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan masyarakat kalia lia.

4.1.6 Kesehatan Dan Pendidikan

Secara umum sumber air bersih masyarakat kelurahan kalia lia berasal dari mata air (melalui perpipaan). Untuk keperluan irigasi pertanian warga memperoleh dari sungai/kali yang ada di kelurahan kalia lia. Untuk

memaksimalkan pelayanan kesehatan di kelurahan kalia lia telah di bangun puskesmas dan posyandu. Demikian pula dengan tenaga medis yang ditempatkan masih minim jumlahnya hanya satu orang yang bertugas pelayanan yang di berikan seperti pengobatan penyakit yang biasa diderita oleh warga, memberikan penyuluhan, membantu warga dalam proses persalinan.

Tabel 4.4

Jenis Penyakit Yang Sering Diderita Warga dan Kebiasaan Tempat Berobat

Anggota keluarga	Penyakit yang sering di derita	Tempat/ orang yang dipercaya untuk berobat
Balita	Flu, diare,panas/demam	Berobat ke puskesmas/poskesedes, beli obat diwarung, ramuan gula garam.
Anak- Anak	Batuk, demam,flu dan alergi	Berobat ke puskesmas/poskesedes, beli obat di warung.
Orang Dewasa	Rematik, kurang darah,alergi,lambung/maag, malaria,pegal linu,batuk,sakit gigi,sakit kepala	Dipijat,beli obat warung,ke puskesmas, dan dukun.

(sumber : data hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kalia Lia 2022)

Dikelurahan kalia lia sebagian besar warga mendapatkan layanan jamkesmas tetapi hanya di butuhkan saat melakukan pengobatan secara ringan..

sedangkan dalam kondisi membutuhkan pengobatan secara intens harus ke rumah sakit, letak rumah sakit dengan Kelurahan Kalia Lia cukup jauh.

Dalam mengakses pengobatan, sebanyak 90,67% masyarakat Kelurahan Kalia Lia memanfaatkan jasa pengobatan puskesmas. Adapula yang ke Bidan/dokter ahli sebanyak 0,58 % sedangkan yang lainnya berobat ke dukun dan lebih memilih memanfaatkan aset lokal antara lain beli obat ke kios/apotik untuk pengobatan secara tradisional. Hal ini di sebabkan karena minimnya pengetahuan dan kesadaran warga tentang peran tenaga kesehatan.

Tabel 4.5
kepemilikan WC di Kelurahan Kalia Lia

No	Kepemilikan WC	KK	%
1	Pribadi	255	69,68
2	MCK/Umum	63	17,21
3	Bebas	48	13,11
	Total	366	100

Sumber : Profil Kelurahan Kalia Lia 2022

Penggunaan sanitasi bagi warga kelurahan kalia lia masih kurang baik. Hal ini dapat diketahui bahwa masih ada sekitar 48 KK masih BAB secara bebas, sementara ada 63 KK yang memanfaatkan MCK/Umum serta juga ada yang sudah memiliki WC pribadi yakni sekitar 255 KK.

Tabel 4.6
kepemilikan Air Bersih Masyarakat di Kelurahan Kalia Lia

No	Kepemilikan air bersih	KK	%
1	PDAM	163	44,53
2	Nyambung tetangga	76	20,76
3	Sumur	18	4,91
4	Penampungan/Kran tugu	78	21,31
5	Kali/pancuran	31	8,46
Total		366	100

Pada umumnya warga Kelurahan Kalia Lia telah memanfaatkan air berasal dari pancuran, dan perpipaan kebutuhan konsumsi rumah tangga, mandi dan mencuci. Namun tahun 2012 teridentifikasi kran tugu banyak yang mengalami kerusakan, hal ini disebabkan oleh kondisi kran tugu yang tidak terawat dan tidak mengalirnya air PDAM dalam waktu yang lama. Demikian pula dengan sumur yang kondisinya perlu perawatan dan perbaikan sehingga pemanfaatan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

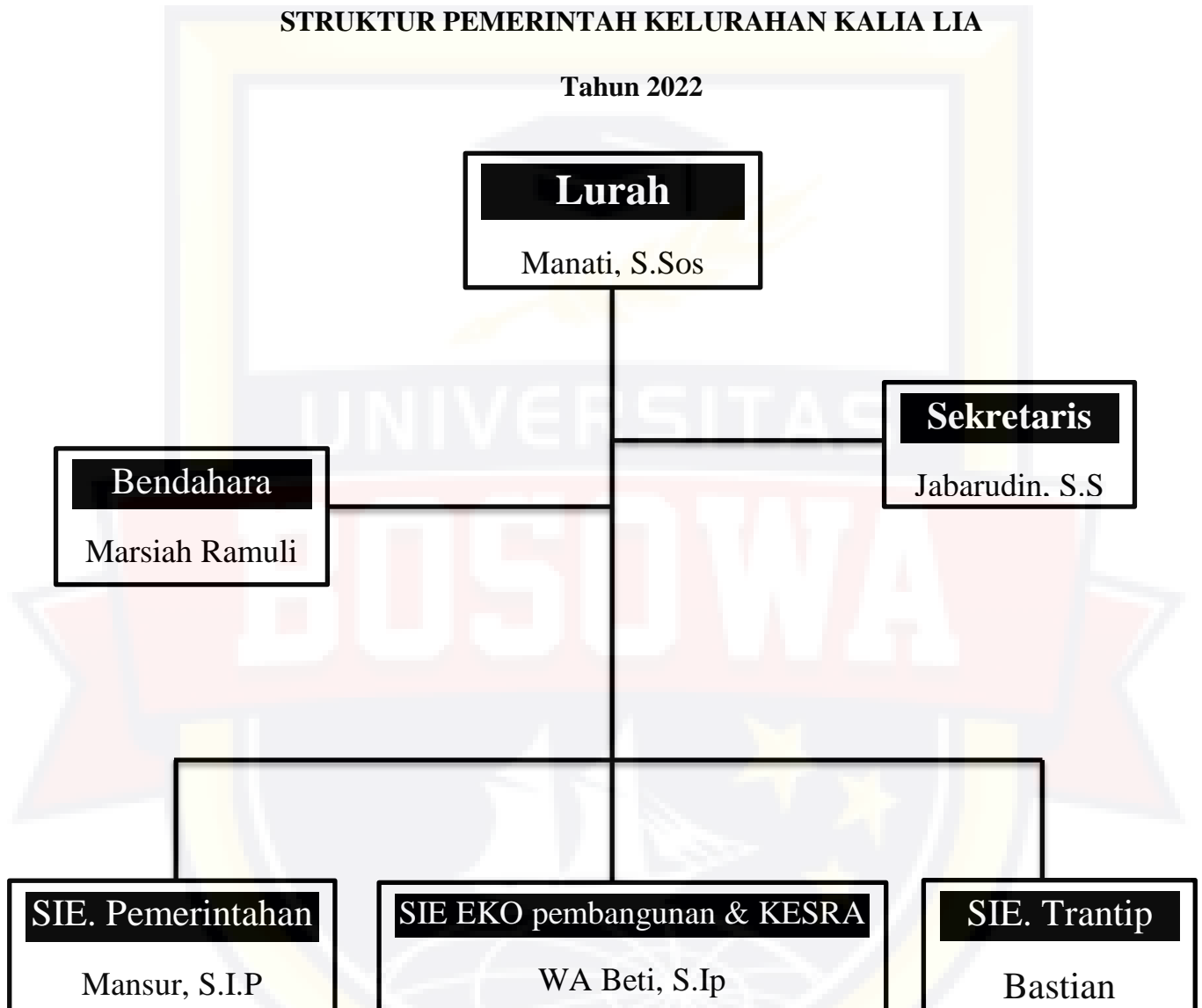
Program pendidikan sangat tergantung pada sarana dan infrastruktur pendidikan yang memadai dalam upaya memberikan dan meningkatkan fungsi pendidikan dan pengajaran kepada calon peserta didik/siswa. Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di berbagai tingkat pendidikan di kelurahan kalia lia.

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam rangka membangun sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas sebagai wujud peningkatan kecerdasan masyarakat. Rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai semakin tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan warga meningkat. Tarif pendidikan masyarakat ini juga sangat menentukan kemampuan masyarakat kelurahan Kalia Lia untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Kelurahan Kalia Lia memiliki beberapa asset pendidikan diantaranya 1 SD, 1 TK, 1 PAUD, dan 1 mis. Sebagian besar kepala keluarga tidak memiliki pendidikan yakni sekitar 121 KK, sedangkan yang berpendidikan tamat SD ada 150 KK, tamat SMP 43 KK, tamat SMA 42 KK dan 10 KK memiliki jenjang pendidikan sarjana. Dengan rendahnya pendidikan kepala keluarga mempengaruhi jenjang pendidikan anak dimana kemampuan menyekolahkan anak rata-rata hanya pada jenjang pendidikan SD, bahkan ada yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya selain karena faktor ekonomi ada juga di sebabkan karena keinginan anak untuk bersekolah tidak ada sehingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

4.1.7 Struktur Pemerintah Kelurahan Kalia Lia

Gambar 4.1



Setiap jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan kelurahan kalia lia memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Lurah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah fungsih dari lurah:

- 1) Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan
- 2) Penyelenggaraan dan pembinaan dibidang pemberdayaan masyarakat
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitas ekonomi dan pembangunan
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan
- 6) Pengelolaan urusan kesekretariatan

b. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok mengordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,perklengkapan serta administrasi kepegawaian. Berikut adalah fungsi dari sekretaris:

- 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan
- 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran
- 3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan
- 4) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan, dan
- 5) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertahanan serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah fungsi dari seksi pemerintahan dan kemasyarakatan:

- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan
- 2) Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
- 3) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan

- 4) Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan
- 8) Pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat
- 9) Pengumpulan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya
- 10) Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. Berikut adalah fungsi dari seksi ekonomi dan pembangunan:

- 1) Pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi data di bidang ekonomi dan pembangunan

- 2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan
- 3) Pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset pemerintahan kota di lingkungan kelurahan
- 4) Pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan
- 5) Pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan
- 6) Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang ekonomi dan pembangunan.

e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas ;pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan.

Berikut adalah fungsi seksi ketentraman dan ketertiban umum:

- 1) Pengumpulan pengelolaan dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan
- 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam

- 4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat.

4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif dengan bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia dengan cara melakukan observasi terhadap kantor lurah dan masyarakat kalia lia. Data laporan ini didapatkan dari hasil wawancara di mana wawancara yang dilakukan diarahkan langsung oleh pegawai kantor lurah kalia lia dan masyarakat, selain itu hasil wawancara dicatat langsung dan direkam dengan ponsel pribadi. Data yang menjadi fokus utama penulis dalam pengelolaan data adalah apakah masyarakat kalia lia menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia.

Tabel 4.7

Responden Wawancara

Nama Informan	Jabatan Informan
Manati, S.Sos	Lurah Kalia Lia
Jabarudin, S.S	Sekretaris Lurah
Marsiah Ramuli	Bendahara Lurah
Yadin	Masyarakat Kalia Lia
Basiri	Masyarakat Kalia Lia

4.3 Proses Wawancara

Proses wawancara yang dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan bersama antara peneliti dengan informan dimana tempat dan waktunya berbeda-beda dari satu informan ke informan yang lain. Wawancara dilakukan paling lambat 30 menit dan paling cepat 15 menit. Pada saat akan melakukan wawancara peneliti menunggu 30 detik untuk informan mempersiapkan kata-kata yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Dengan cara ini dapat membuat informan dan peneliti bisa dengan nyaman melakukan wawancara. Proses wawancara dilakukan didalam kantor lurah dan rumah masyarakat Kelurahan Kalia Lia, tempat wawancara ini disediakan oleh pegawai kantor lurah dan masyarakat Kelurahan Kalia Lia untuk mempermudah wawancara dan tidak terlalu banyak menyita waktu.

4.4 Hasil Interview

4.4.1 Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di kelurahan kalia lia

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber berikut ini merupakan analisis dari penerapan prinsip *good governance* yaitu :

1. Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia

Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan kelurahan sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu kelurahan, terutama yaitu ekonomi suatu kelurahan, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk

berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kelurahan diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBD.

Apakah tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran sangat rendah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manati S.Sos selaku lurah kalia lia pada tanggal 13 April 2022, menyatakan bahwa “iya tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan rendah sebab dalam hal pengawasan anggaran masyarakat kalia lia tidak dilibatkan akan tetapi ada dinas BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang mengawasi secara langsung apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. dan laporan keuangan itu sendiri di periksa langsung oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Setelah diadakan musrenbang barulah masyarakat kalia lia bisa mengetahui berapa anggaran yang akan di programkan di kelurahan ini”.

Dari hasil wawancara tersebut, pak lurah ingin menyampaikan bahwa masyarakat tidak ikut serta dalam melakukan pengawasan anggaran sebab pengawasan anggaran di awasi langsung oleh pemerintahan. Pendapat ini juga didukung oleh Seklur dan Bendahara sehingga bisa disimpulkan bahwa menurut pemerintah masyarakat kalia lia tidak ikut dalam pengawasan anggaran.

Sedangkan menurut Bapak Basiri selaku masyarakat kelurahan kalia lia pada tanggal 14 April 2022, mengatakan bahwa “iya tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran rendah masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pengawasan anggaran tersebut. Masyarakat juga banyak yang tidak tau tentang apa itu anggaran, sehingga tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran sangat rendah”.

Apakah ada kegiatan musrenbang terkait pengelolaan alokasi dana?

Menurut Bapak Jabarudin, S.S selaku Sekretaris Lurah pada tanggal 13 April 2022, mengatakan bahwa “Iya jelas ada kegiatan musrenbang terkait pengelolaan

alokasi dana, bahkan musyawarah yang ada di kelurahan ini tersistem dari tingkat bawah yang disebut dengan rembuk warga yang dilaksanakan di setiap lingkungan RT, masing-masing RT memanggil warganya kemudian ditanyakan program apa saja yang akan di usulkan untuk dana yang sudah di tentukan, tetapi anggaran yang di tentukan itu tidak mutlak kadang setelah penetapan berubah lagi makanya ada istilahnya anggaran perubahan dan selama saya menjabat di sini tidak ada istilahnya perubahan itu berkembang selalu perubahan berkurang apalagi saat ini musim covid, setelah rembuk warga diadakan pra musrenbang dimana akan di kumpulkan semua warga kalia lia yang dihadiri oleh tingkat OPD (organisasi perangkat daerah) yang dilaksanakan di kantor lurah kalia lia, setelah pra musrenbang diadakanlah musrenbang dimana musrenbang ini merupakan penetapan. Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Jabarudin ingin menyampaikan bahwa di kelurahan kalia lia sering diadakan musrenbang. Pendapat ini juga didukung oleh Bapak Lurah Kalia lia dan bendahara sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kegiatan musrenbang di kelurahan kalia lia terkait pengelolaan alokasi dana”.

Sedangkan menurut Bapak Yadin selaku masyarakat kalia lia pada tanggal 14 April 2022 , “Iy ada kegiatan musrenbang terkait pengelolaan alokasi dana, namun tidak semua masyarakat kelurahan kalia lia mau mengikuti musrenbang tersebut sebab kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kegiatan musrenbang, yang sering mengikuti kegiatan musrenbang kebanyakan dari kaum pria atau bapak-bapak”.

Apakah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terkait pengelolaan keuangan?

Menurut Ibu Marsiah Ramuli selaku bendahara lurah pada tanggal 13 April 2022, “tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan kalia lia ini bisa di bilang cukup tinggi, karena dalam prinsip pengelolaan keuangan di kelurahan ini ada namanya swadayan masyarakat, dana kelurahan ada yang dikelola masyarakat yang disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas), mengelolah program anggaran yang kemudian akan membuat pelaporan-pelaporan di tingkat Pokmas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada kami di sini, kami juga buat rangkum dan akan dipertanggungjawabkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelurahan kalia lia menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Walaupun tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran rendah namun menurut saya pengawasan anggaran bukanlah tanggung jawab masyarakat atau bisa di bilang bkan tugas masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran melainkan tugas dari pemerintah kota.

2. Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia

Kelurahan Kalia Lia menjalankan sistem pemerintah sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat. Pak lurah berpendapat bahwa:

“Semua prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan harus sesuai dengan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dan sesuai permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Yang pasti semua prosedur yang kami lakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ditetapkan.” (wawancara bapak Manati, S.Sos selaku lurah kalia lia Tanggal 13 April 2022).

Pendapat ini juga di dukung oleh sekretaris lurah dan bendahara lurah yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan kalia lia telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Apakah pemerintah Kelurahan Kalia Lia sudah melakukan kegiatan sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku di Indonesia?

“ sudah, tapi belum semuanya soalnya kelurahan kalia lia ini kan masih tergolong kelurahan baru. Selain itu, kami juga masih kekurangan sumber daya baik berupa

teknologi ataupun SDM. Jadi masih belum bisa di bilang maksimal. Tetapi pemerintah kalia lia sudah berupaya untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan baik” (wawancara bapak Manati, S.Sos selaku lurah kalia lia Tanggal 13 April 2022).

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bendahara Kelurahan Kalia Lia:

“ Cuma kan biasanya teori dan prakteknya kan bisa beda, jadi tidak dapat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Soalnya biasanya kalau diprakteknya kan biasa tuh ada kendala-kendala, jadi kadang tidak bisa tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.” (Marsiah Ramuli selaku bendahara kalia lia tanggal 13 April 2022)

Dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Kalia Lia sudah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum dapat diterapkan secara penuh dikarenakan kurangnya sumber daya manusia ataupun teknologi yang kurang mendukung.

3. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia

Transparansi yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan instansi pemerintah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai terutama dalam bidang pengelolaan keuangan.

Apakah masyarakat diberikan izin untuk mengakses mengenai pengelolaan keuangan seperti laporan realisasi anggaran atau pertanggungjawaban pemerintah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manati S.Sos pada tanggal 13 April 2022, mengatakan bahwa “iya masyarakat diberikan izin

untuk mengakses mengenai pengelolaan keuangan apalagi zaman sekarang ini yang semakin canggih, buktinya kami memberikan data-data laporan keuangan untuk kamu yang bagian akademis/mahasiswa di samping kebutuhan kuliah apalagi masyarakat kalia lia pasti kami akan kasih jika dibutuhkan, kami sama masyarakat kalia lia sangat terbuka tidak bisa di tutup-tutupi karena jika salah sedikit mereka akan mengadakan demo”.

Menurut Bapak Jabarudin S.S Selaku Sekretaris Lurah pada tanggal 13 April 2022, mengatakan bahwa “Terkait laporan realisasi kepada masyarakat apabila masyarakat mau mengetahui tentang rincian laporan realisasi dan pertanggungjawaban tersebut, masyarakat di berikan akses untuk mengetahui laporan realisasi dan pertanggung jawaban tersebut. Tetapi karena kelurahan kalia lia belum memiliki situs resmi, maka masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan harus langsung datang ke kantor lurah”.

Dari analisis di atas, prinsip transparansi sudah dilaksanakan, dengan cukup baik karena pemerintah Kelurahan Kalia lia sangat terbuka dengan masyarakat, di lihat dari rincian laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung dari kantor lurah jika di butuhkan dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik pemerintah lurah agar dapat berjalan dengan baik.

4. Penerapan Prinsip Efektifitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia

Pada Kelurahan Kalia Lia, kegiatan musrenbang ini bertujuan untuk membahas segala sesuatu yang akan direncanakan guna untuk membangun perekonomian kelurahan. Segala sesuatu yang direncanakan dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan pak lurah :

Apa yang bapak lakukan agar pembangunan di kelurahan kalia lia dapat terlaksana secara efektif dan efisien?

“ melaksanakan musrenbang yang nantinya musrenbang ini akan dibahas semua aspirasi-aspirasi masyarakat kelurahan dan namun aspirasi-aspirasi masyarakat ini kan tidak semua dapat dianggarkan kedalam APBD. Maka nantinya akan diseleksi atau beberapa aspirasi akan di prioritaskan. Nantinya dari musrenbang ini akan muncul yang namanya peraturan peraturan kelurahan dan rencana kerja pemerintah ”. (Bapak Manati S.Sos selaku lurah kalia lia tanggal 13 April 2022)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat nantinya akan diseleksi kembali dan akan masuk kedalam daftar prioritas yang nantinya akan di masukkan kedalam APBD

Dalam merancang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), pemerintah bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tim pelaksana memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar kelurahan kali alia dapat di bangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) telah terbentuk, maka pak lurah akan mengajukan APBD tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBD kurang efektif dan efisien, maka nanti pak lurah,BPD, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBD perubahan yang nantinya akan disahkan oleh bupati.

Dari analisis tersebut, dapat di simpulkan bahwa, Kelurahan Kalia Lia sudah menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Dalam merancang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), pemerintah bersama BPD dan

tim pelaksana akan memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar Kelurahan Kalia Lia dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBD telah terbentuk, maka pak lurah mengajukan APBD tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBD kurang efektif dan efisien maka nanti pak lurah, BPD, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBD perubahan yang nantinya akan di sahkan oleh bupati.

5. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah lurah juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah lurah kepada masyarakat dapat berupa pembinaan mengenai pengelolaan keuangan lurah.

Apakah pemerintah sudah melakukan pembinaan dalam menjalankan kewajiban mereka bagi masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manati S.Sos selaku lurah kalia lia pada tanggal 13 April 2022, mengatakan bahwa “setiap pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah insyaAllah bisa di terima oleh masyarakat, ada beberapa pembinaan yang di lakukan di kelurahan kalia lia yaitu kepemudaan karang taruna dan pembinaan menjahit”.

Dari analisis hasil wawancara tersebut, pemerintah telah melakukan pembinaan melalui lembaga PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), kepemudaan karang taruna namun peneliti menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan lurah kepada masyarakat awam, oleh karena itu sebagian besar masyarakat awam belum memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan secara lebih mendalam di Kelurahan Kalia lia. Dampaknya, masyarakat merasa tidak mau tahu mengenai pengelolaan keuangan tersebut, sehingga sebagai dampaknya masyarakat kurang mau berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut terutama dalam pengawasan.

Apabila terdapat perubahan APBD (Anggara Pendapatan Belanja Daerah), apakah pemerintah kembali bermusyawarah bersama masyarakat?

Menurut Bapak Jabarudin, S.S selaku sekretaris lurah pada tanggal 13 April 2022, mengatakan bahwa “jika terdapat perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maka penanggungjawab di kota seperti BAPPEDA (badan perencanaan bangunan) mereka tidak langsung ke masyarakat jika ada perubahan anggaran baik itu faktor internal maupun eksternal selalu di adakan rapat. Yang diadakan oleh tingkat kota dan dihadiri oleh camat dan juga lurah maka di situ disampaikan bahwa ada perubahan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan dengan yang akan direalisasikan sehingga di adakan perubahan”.

Sedangkan menurut Bapak Basiri selaku masyarakat kelurahan kalia lia pada tanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa iya jika terdapat perubahan anggaran maka pemerintah kelurahan kalia lia mengadakan musyawarah bersama masyarakat terkait perubahan anggaran tersebut,

pelaksanaan ADK (Alokasi Dana Kelurahan) di kelurahan kami sangat terbuka, setiap ada perubahan anggaran pemerintah mengadakan musyawarah bersama masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat termasuk saya selalu di panggil oleh pak seklur untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan anggaran tersebut berubah.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa pemerintahan kalia lia bisa di katakana sudah cukup bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya hal tersebut di buktikan dengan adanya pembinaan terhadap masyarakat kalia lia, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun demikian masyarakat masih banyak yang menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan dilapangan dan analisis yang telah di kemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia sudah terlaksana dengan cukup baik. Walaupun tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran rendah namun menurut penulis pengawasan anggaran bukanlah tanggung jawab masyarakat atau bisa dibilang bukan tugas masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran melainkan tugas dari Pemerintah Kota.
2. Penerapan prinsip tegaknya supremasi hukum dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia sudah terlaksana dengan cukup baik di mana sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum dapat diterapkan secara penuh dikarenakan kurangnya sumber daya manusia ataupun teknologi yang kurang mendukung.
3. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia sudah dilaksanakan dengan cukup baik karena pemerintah Kelurahan Kalia Lia sangat terbuka dengan masyarakat, dilihat dari rincian laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban, masyarakat biasa mendapatkan informasi langsung dari kantor lurah jika di butuhkan dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan

tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritisi pemerintah lurah agar dapat berjalan dengan baik.

4. Penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi Kelurahan Kalia Lia sudah menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Dalam merancang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), pemerintah bersama BPD dan tim peleksana akan memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar Kelurahan Kalia Lia dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin.
5. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Kalia Lia bisa dikatakan sudah cukup bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Hal tersebut di buktikan dengan adanya pembinaan terhadap masyarakat Kalia lia, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun demikian masyarakat menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana.

7.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah Kelurahan Kalia Lia lebih mampu lagi meningkatkan atau mendorong masyarakat agar bisa hadir dalam forum musyawarah (musrenbang) sehingga pemerintah kelurahan mampu dan siap menerima masukan-masukan dari masyarakat.

2. Untuk memenuhi penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan alokasi dana kelurahan dalam membangun Kelurahan Kalia Lia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H., Palisuri, P., Hernita, H., Syarifuddin, S., Syamsuddin, I., & Herman, R. (2021, December). **KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA LOKAL**. In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (pp. 480-485).
- Armereo (2020) **Manajemen Keuangan**. Nusa Litera Inspirasi.
- Astuty, H. S. (2019). **Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula**. Deepublish.
- Dwi Susanto, (2015). **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Public**. Jurnal Paradigma. Vol. 12, No.02
- Hendra Karianga, (2017). **Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Politik**. Depok :kencana.
- Indah Wahyuni Utami, Widi Nugrahaningsi, (2017). **Penerapan *Good Governance* Di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjar Sari Surakarta**. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan. 2579-5597.

Kabul setio utomo, (2018). **Analisis *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa.** Volume 13, Nomor 1.

Marolop Hasudungan Silitonga, (2021). **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Gunung Rintis Kecamatan STM Hilir Kabupaten Delisergan.**

Nur Baiti Sukma Dewi, (2020). **Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pepe, Kecamatan Ngawen.**

Nurdiansyah, H., dan Rahman, R. S. (2019) **Pengantar Manajemen.** Diandra kreatif.

Purba, (2021) **Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah.** Yayasan Kita Menulis.

Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda , (2019) ***Good Gocernance* Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Suci Fajarini (2020). ***Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa.**

Syamsuddin, I., Muhammad, P. N.,& karim, A (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022. YUME:journal of management, 5(2), 170-177.

Syamsuddin, I (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN TERHADAPAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. Jurnal ilmiah AKSI STIE AMKOP Makassar. Vol. 6 No. 1.



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 280 /FEB/UNIBOS/III/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,

Walikota Baubau
cq. Kepala Kesbang & Pempol Kota Baubau.

Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Yesi
 NIM : 45 18 013 004
 Program Studi : Akuntansi
 No. Tlp/HP : 0822-3863-7901

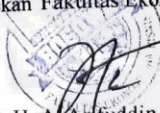
Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia Kota Bau Bau”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Tbu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 23 Maret 2022
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


 Dr. H. A. Al-Huddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
 NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 20 A ☎ (0402) 2822294

BAUBAU

Baubau, 25 Maret 2022

Kepada

Nomor : 070 / 139

Yth. **Camat Lea-Lea Kota Baubau**

Lampiran : -

di -

Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Baubau

Dasar :

1. Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
2. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Kota Baubau.
4. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Bosowa, Nomor: A.280/FEB/UNIBOS/III/2022, Tanggal 25 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat mengizinkan dan memberikan data dalam rangka penyusunan Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/ Desertasi/ Tesis) kepada :

Nama : **YESI**
 Tempat / Tanggal Lahir : **Buton, 29 Maret 2000**
 Agama : **Islam**
 Jenis Kelamin : **Perempuan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Alamat : **Kahalia**
 Judul : **"Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Kalia Lia Kota Baubau"**.
 Waktu : -
 Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar**

Kepada yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menaati segala ketentuan yang berlaku di daerah setempat;
2. Hasil Survey / Penelitian diserahkan 1 (satu) Berkas Kepada Pemerintah Kota Baubau Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
UB.KABID BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI
MAHASISWA, KEMASYARAKATAN,



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Up. Ka.BakesbangPol Prov. Sultra di Kendari;
2. Wali Kota Baubau Up. Kabag. Tapem Setda Kota Baubau di Baubau;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU
KECAMATAN LEA-LEA**

Jalan Raya Bukit Kampenalo No. Telepon (0402) Kelurahan Kalia-lia

Kalia-lia, 25 Maret 2022

Nomor : 070 / 36
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

K e p a d a
Yth. Lurah Kalia-lia
Di - Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Baubau Nomor : 070 / 139 tanggal 25 Maret 2022 tentang izin penelitian sebagaimana perihal tersebut diatas.

Maka sehubungan dengan hal dimaksud pada prinsipnya disetujui setelah dipelajari rencana penelitian kegiatan yang bersangkutan dan diharapkan kepada saudara kiranya dapat diizinkan dan memberikan data dalam rangka penyusunan Skripsi kepada :

Nama : **YESI**
Tempat / Tgl Lahir : Buton, 29 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Cempaka Kelurahan Kalia-lia
Judul : **“Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Kalia-lia”**
Waktu : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makasar

Diminta kepada yang bersangkutan harus :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku di daerah setempat dimana saudara adakan penelitian / kegiatan.
2. Hasil Penelitian saudara diserahkan 1(satu) eks. untuk arsip di Kecamatan

Demikian surat izin penelitian ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Camat Lea-Lea
Sekretaris

Ir. IWAYAN SARJANA, MSi
NIP. 19681212/199401 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Up. Ka. Balitbangda Prov. Sultra di Kendari;
2. Walikota Baubau Up. Kabag Tapem Setda Kota Baubau di Baubau;
3. Dekan Fisip UMB di Baubau;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
KECAMATAN LEA-LEA
KELURAHAN KALIA-LIA
Jln. Poros Kolese No..... Tlpn.(0402)

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

NO. 070/ 94

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kalia-lia Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau menerangkan bahwa :

Nama : **YESI**
Nomor Stambuk : 4518013004
Program/ Semester : Sarjana/ Genap 2021/2022
Jurusan : Akuntansi

Bahwa yang tersebut namanya diatas, telah mengadakan penelitian di Kelurahan Kalia-lia Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dari Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2022, dengan judul penelitian " **Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Kalia-lia**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Kalia-lia, 13 April 2022

Lurah Kalia-lia



MANATI, S.Sos

NIP. 19780110 200901 1 009

DOKUMENTASI KEGIATAN LAPANGAN

wawancara dengan Lurah Kalia Lia, 13/04/2022



Wawancara Dengan Bendahara Kali Lia, 13/04/2022



Wawancara Dengan Masyarakat Kalia Lia, 14/04,2022



Wawancara Dengan Tokoh Pemuda, 14/04/2022

PERTANYAAN

1. Apakah tingkat keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran sangat rendah?
2. Apakah ada kegiatan musrembang terkait pengelolaan alokasi dana?
3. Apakah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terkait pengelolaan keuangan?
4. Apakah masyarakat diberikan izin untuk mengakses mengenai pengelolaan keuangan seperti laporan realisasi anggaran atau pertanggung jawab pemerintah?
5. Apakah akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh?
6. Apakah pengumuman tentang pengelolaan keuangan bisa di dapatkan setiap waktu?
7. Apakah pemerintah sudah melakukan pembinaan dalam menjalankan kewajiban mereka bagi masyarakat?
8. Pembinaan seperti apa yang di berikan pemerintah kepada masyarakat
9. Apabila terdapat perubahan APBD, apakah pemerintah kembali bermusyawarah bersama masyarakat?
10. Apakah proses dan tanggung jawab pengelolaan keuangan diawasi terus menerus?
11. Apa yang bapak lakukan agar pembangunan di kelurahan kalia lia dapat terlaksana secara efektif dan seefisien mungkin?
12. Apakah pemerintah kelurahan kali alia melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku diindonesia?
13. Apakah bapak atau ibu mengerti tentang pengelolaan keuangan?
14. Apakah pemerintah pernah melakukan pungutan selain yang telah di tetapkan peraturan kelurahan?

